

II  
NAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**SKRIPSI**

**PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL  
KOTA PALEMBANG**



Disusun oleh

**DIAN HIDAYAT  
01003120040**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi  
2006**

.1/1

S  
357.07  
hid  
p  
2006

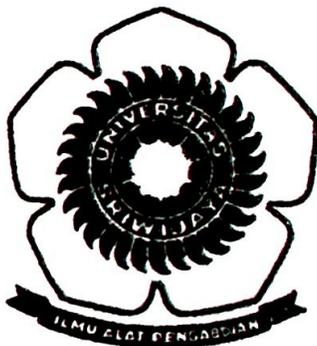
14835 / 15197.

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**



**SKRIPSI**

**PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL  
KOTA PALEMBANG**



**Disusun oleh**

**DIAN HIDAYAT  
01003120040**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi  
2006**

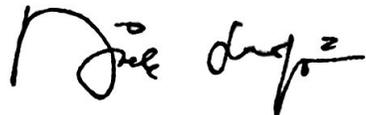
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : DIAN HIDAYAT  
NIM : 01003120040  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
MATA KULIAH : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
KEUANGAN DAERAH  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI  
TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL  
KOTA PALEMBANG

**PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

TANGGAL : 9 September 2006 KETUA PANITIA :



**Dr. H. Didik Susetyo, M.Si**  
NIP : 131673869

TANGGAL : 9 September 2006 ANGGOTA :



**Dra. Hj. Enny Muhaini H.**  
NIP : 131109615

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**SKRIPSI**

**PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL KOTA PALEMBANG**

**Diajukan Oleh :**

**DIAN HIDAYAT  
01003120040**

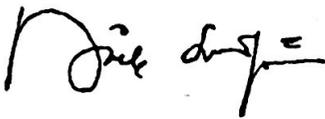
**Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Komprehensif**

**Pada tanggal 29 September 2006**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Panitia Ujian Komprehensif**

**Ketua**



**Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP : 131673869**

**Anggota**



**Dra. Hj. Enny Muhaini H.  
NIP : 131109615**

**Anggota**



**Drs. Suhel, M.Si  
NIP : 131993979**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



**Drs. Suhel, M.Si  
NIP : 131993979**

*Motto :*

*" Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan "*

*(QS. Al-Mujaadilah (58): 11)*

*" Dunia masa depan adalah milik orang yang memiliki visi di hari ini "*

*(Robert Schuller)*

*Karya ini*

*Kupersembahkan untuk:*

*@ Kedua Orang Tuaku Tercinta*

*@ Saudara-saudaraku Tersayang*

*@ Almamaterku*

*@ Para Pendidikku*

*@ Sahabat-sahabatku*

## KATA PENGANTAR

Desentralisasi fiskal merupakan bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemampuan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri khususnya dalam memperoleh sumber-sumber keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi Derajat Desentralisasi Fiskal (DD) karena DD diperoleh dari rasio PAD dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Secara tidak langsung perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dipengaruhi pula oleh tingkat pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*). Kedua variabel ini mempunyai korelasi yang erat sebagai indikator kesejahteraan dan kemampuan daerah otonom. Kota Palembang sebagai daerah otonom dengan kemajuan pembangunan yang cukup pesat serta memiliki potensi besar bagi pengembangan berbagai aspek ekonomi merupakan objek yang menarik untuk diteliti. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang”. Penulis mencoba menelaah tingkat kemampuan atau kemandirian fiskal Kota Palembang dan menganalisis tingkat signifikansi dari hubungan kedua variabel tersebut. Selain itu, penulis mencoba

melihat prospek perkembangan Pendapatan Asli Daerah sebagai faktor yang berperan dalam menentukan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang.

Penulis sadar bahwa hasil dari penelitian ini tidak dapat dikatakan sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan atau kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun.

Demikian semoga penelitian dari skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pembaca, Amien.

Inderalaya, September 2006

**DIAN HIDAYAT**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan Hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang” dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Prof . Dr. Ir. Zainal Ridho Djafar, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Syamsurizal, S.Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Suhel, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya, yang senantiasa memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan program studi.
4. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi I, yang telah bersabar membimbing dan mengarahkan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dengan baik.

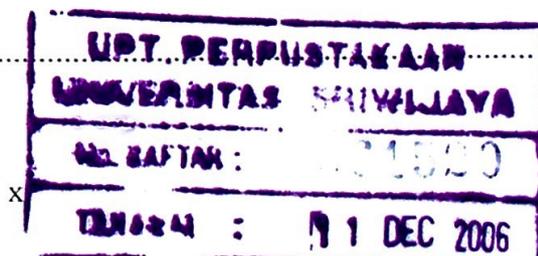
5. Dra. Hj. Enny Muhaini Hanafiah, selaku Pembimbing Skripsi II, yang sangat membantu dalam memberikan nasehat dan masukan dalam proses penulisan skripsi dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan melancarkan administrasi selama penulisan kripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta yang telah berjuang untuk mendidik, membimbing, membesarkan serta memberikan kontribusi moril dan materil yang tak terhingga sejak denyut jantung pertama hingga hembusan nafas saat ini.
8. Kakak-kakakku dan Adikku tersayang yang telah banyak memberikan nasehat, masukan, dan bantuan di saat susah maupun senang selama ini.
9. Sahabat-sahabatku “Burung Hantu” di Gemapala “WIGWAM” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan warna dalam hidup ini dan menjadikan hidup lebih berarti untuk saling menghargai alam dan sesama manusia.
10. Pengurus BEM Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Periode 2002 s.d 2006 yang telah bekerja sama dan berbagi dalam kehidupan berorganisasi.
11. Pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) periode 2000 s.d 2006 yang telah menyatukan seluruh teman-teman satu almamater.
12. Seluruh teman-temanku Jurusan Ekonomi Pembangunan Angk. 2000 yang selama ini saling membantu dan berbagi suka dan duka hingga menyelesaikan studi ini.

13. Adik-adik mahasiswa EP Angk. 2001 s.d 2003 yang selalu mendorong untuk segera menyelesaikan studi ini.
14. Seluruh staff dan Manajer Lion Air Stasiun / district PLM serta Air Crew Lion Airlines yang telah saling bekerja sama dalam aviation handling dan memberikan spirit dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Herson Senior EP yang telah membantu tanpa jasa dalam menyelesaikan bagian akhir skripsi ini.
16. Teman-teman EP Angk.2000, Yovie, Doni, Ari, Payan, Nizal Gomes, Teddy QQ, yang telah mendahului dan telah memberikan supportnya.
17. Teman-teman akhir seperjuangan Angk. 2000 Bram, Bambang sangkut, Adi Vampire, Irvan, Al Karmani dan Agus Jolor.
18. Seluruh sahabat-sahabatku diluar almamater yang telah mempunyai andil untuk mempercepat misi meraih sarjana ini.
19. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan saran dan kritik serta kontribusi moriil maupun materiil dalam proses penulisan skripsi ini.
20. Terima kasih kepada alam yang telah mendidik dan membuka hati untuk mengagumi dan mensyukuri keagungan ciptaan Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Persetujuan Skripsi .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ucapan Terima Kasih .....	vii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Grafik .....	xvi
Daftar Gambar .....	xvii
Daftar Lampiran .....	xviii
Abstraksi .....	xix
Abstract .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Kerangka Teori .....	9
1.6. Penelitian Terdahulu .....	21



1.7. Hipotesis .....	22
1.8. Metodologi Penelitian .....	22
1.8.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	22
1.8.2. Sumber Data .....	22
1.8.3. Teknik Analisis .....	23
1.9. Batasan Variabel Operasional .....	28
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>31</b>
2.1. Gambaran Umum Kota Palembang .....	31
2.1.1. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah .....	31
2.1.2. Keadaan Alam .....	33
2.1.3. Pemerintahan dan Wilayah Administrasi .....	33
2.1.4. Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja .....	36
2.2. Keadaan Perekonomian Kota Palembang .....	39
2.2.1. Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	39
2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi .....	47
2.2.3. Laju Inflasi Sektoral .....	54
2.2.4. Pendapatan Per kapita .....	56
2.3. Deskripsi Variabel Penelitian .....	58
2.3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan .....	58
2.3.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	59
2.3.3. Perkembangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) ...	62

2.3.4. Perkembangan Subsidi dan Bantuan Dana .....	64
2.3.5. Perkembangan Total Penerimaan Daerah (TPD) .....	66
BAB III PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI	
TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL	
KOTA PALEMBANG .....	68
3.1. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang .....	68
3.2. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional	
Bruto (PDRB) Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal .....	72
3.2.1. Hasil Estimasi .....	72
3.2.2. Pengujian Statistik .....	73
3.3. Prospek Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang .....	77
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	86
4.1. Kesimpulan .....	86
4.2. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .....	18
Tabel 2.1.	Jarak Kota Palembang dengan Kota/Kabupaten Lain .....	32
Tabel 2.2.	Banyaknya Kelurahan, Desa, dan Luas Wilayah Per kecamatan Kota Palembang Tahun 2004 .....	35
Tabel 2.3.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Kota Palembang Tahun 2004 .....	37
Tabel 2.4.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1993 – 2004 .....	38
Tabel 2.5.	PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha .....	41
Tabel 2.6.	PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2000) .....	43
Tabel 2.7.	Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Per Sektor (Dengan Migas) .....	45
Tabel 2.8.	Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Per Sektor (Tanpa Migas) .....	46
Tabel 2.9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1994-2004 .....	48
Tabel 2.10.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001-2004 .....	50

Tabel 2.11. Laju Inflasi Sektoral Kota Palembang Tahun 1994-2004 .....	55
Tabel 2.12. Pendapatan Regional Perkapita Kota Palembang Tahun 1993-2004 .....	57
Tabel 2.13. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha .....	59
Tabel 2.14. Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang .....	61
Tabel 2.15. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) Kota Palembang .....	64
Tabel 2.16. Perkembangan Subsidi dan Bantuan Dana Kota Palembang .....	66
Tabel 2.17. Perkembangan Total Penerimaan Daerah (TPD) .....	67
Tabel 3.1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), serta Subsidi dan Bantuan Dana (SBD) Kota Palembang 1994 – 2005 .....	69
Tabel 3.2. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang Tahun 1993-2005 .....	71
Tabel 3.3. Analisis Uji t- Tabel .....	74
Tabel 3.4. Analisis F Tabel .....	75
Tabel 3.5. Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2006 – 2010 .....	81

Tabel 3.6. Hasil Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2006 – 2010 .....	82
---	----

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Grafik Perkembangan PDRB Atas Harga Berlaku .....	42
Grafik 2.2. Grafik Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan (Tahun Dasar 2000) .....	44
Grafik 2.3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Uji t-Tabel .....	74
Gambar 3.2. Uji F .....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Input – Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Gt PDRB) dan variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DD) serta bentuk Logaritma Natural (Lon).
- Lampiran 2. Output – Hasil Regresi metode *Enter* dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi (Gt PDRB) dan variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DD) dalam bentuk Logaritma Natural (Lon).
- Lampiran 3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1993 – 2004.
- Lampiran 4. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993.

## ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal Kota Palembang. Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang, website, serta literatur. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier sederhana. Hasil regresi menunjukkan koefisien korelasi ( $R$ ) sebesar 0,884 menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat antara variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,782 menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto mampu menjelaskan perubahan Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 78,2 persen, dan 21,8 persen dipengaruhi faktor-faktor lain di luar model ini. Nilai koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,667 mempunyai arti bahwa tambahan satu persen nilai Produk Domestik Regional Bruto akan menyebabkan peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 0,667 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (*ceteris paribus*). Nilai koefisien regresi ( $r$ ) dari variabel Produk Domestik Regional Bruto ini adalah sebesar 0,667 ( $e < 1$ ) dan bersifat inelastis.

## ABSTRACT

The title of this thesis is “The Influence of The Economy Growth to Fiscal Decentralization Degrees in Palembang City”. This research purpose is analyzing influence of the economy growth to Fiscal Decentralization Degrees in Palembang. The analyzed variables are growth of Gross Domestic Produk (GDP) with gasoline fixed-price calculated of basic year 1993 as economy growth indicator and Fiscal Decentralization Degrees. The used data type is secondary which source from Badan Pusat Statistik (BPS) South Sumatera dan Palembang, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Palembang, Palembang City Government, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Palembang, website, literature, etc. This research used simple regression linear method of analyzing. The result show Coefficient Correlation (R) 0,884 indicated rapidly correlation between Fiscal Decentralization Degrees (DD) and Gross Domestic Product (GDP). Coefficient determination (R-square) 0,782 indicated that Gross Domestic Product (GDP) was able to explain Fiscal Decentralization Degrees (DD) adjustment untill 78,2 percent and 21,8 percent influenced by the other external factors. Coefficient regression (r) of Gross Domestic Product 0,667 means every one percent value added of GDP will increase Fiscal Decentralization Degrees amount of 0,667 percent by considering the other variables are fixed (*ceteris paribus*). Coefficient regression (r) 0,667 ( $e < 1$ ) means inelastic.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1. Latar Belakang

Pengembangan dan pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia telah mewujudkan struktur pemerintahan negara yang bersifat desentralisasi. Struktur pemerintahan ini menuntut suatu sistem keuangan daerah di bawah pengawasan pusat yang dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya sebagai unit pelaksana ekonomi yang menyediakan barang-barang publik (Suparmoko, 2002 : 16).

Pelaksanaan desentralisasi tersebut didasarkan atas kebijakan fiskal dan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, serta mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasinya (Ibid). Hal inilah yang mendasari terwujudnya desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal diupayakan untuk mengurangi pola ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang selama era pra-reformasi telah terjadi sehingga daerah dituntut lebih mandiri dalam segala aspek. Pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi seluruh kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari aspek penerimaan dan pengeluaran (Mangkoesobroto, 1993 : 181).

Secara umum kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam pengalokasian sumber-sumber daya, pemerataan dalam pendistribusian pendapatan, dan stabilitas ekonomi sehingga akan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan terakhir, terwujudnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang layak dengan tanpa adanya tingkat pengangguran yang tinggi atau ketidakstabilan harga-harga di suatu daerah akan mampu menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini selanjutnya menentukan kemampuan atau kemandirian dalam pengelolaan daerah secara berkesinambungan.

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam hal pengambilan keputusan dan pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah yang selanjutnya akan menjadi tanggung jawab kepada masyarakat daerah yang bersangkutan secara transparan (Boex, 2001 : 3).

Desentralisasi fiskal menurut Boex terdiri dari :

1. Penerimaan (*Receipts*), berhubungan dengan sumber-sumber penerimaan daerah termasuk pajak dan bukan pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
2. Pengeluaran (*Expenditures*), berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawab atas segala pengeluaran untuk masing-masing tingkatan pemerintahan.
3. Pinjaman dan hutang (*Loans*), berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sehingga menyebabkan terjadinya defisit daerah.

4. Transfer, berhubungan dengan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Penerimaan daerah sebagai pokok utama dari desentralisasi fiskal tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan dana dalam jumlah besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan usaha untuk mengimbangi kegiatan dari pembangunan itu sendiri. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Di samping itu, dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengurangan beban pemerintah pusat, pertumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah (Rasyid, 1989 : 2).

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan hal tersebut, adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 dijelaskan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-Lain Pendapatan. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah; penerimaan pinjaman daerah; dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut harus semakin ditingkatkan oleh pemerintah agar dapat mengimbangi beban biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang juga semakin meningkat, sehingga otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Adolf Wagner (1835-1917) mengemukakan hal seperti ini dalam teori **Hukum Semakin Meningkatnya Pengeluaran Negara** (Sutrisna, 1984 : 364), yang menjelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah, maka pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerah sehingga mampu membiayai pengeluaran daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di samping mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan subsidi atau bantuan dana. Kekuatan PAD suatu daerah tergantung dari struktur penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diambil dari sektor-sektor ekonomi daerah. Besarnya persentase sumbangan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (APBD) akan menjadi ukuran desentralisasi fiskal di tingkat Kabupaten/Kota yang

selanjutnya akan menentukan derajat kemandirian daerah atau keberhasilan otonomi daerah pada umumnya (Kuncoro, 2004 : 79).

Permasalahan yang seringkali muncul sebagai faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah terjadinya distorsi/kesenjangan pemahaman mengenai otonomi daerah itu sendiri, baik di kalangan pejabat pemerintah maupun *stakeholders* sehingga akan menghambat keberhasilan otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah daerah seringkali terjebak pada upaya menaikkan PAD melalui kenaikan tarif pajak dan retribusi daerah dengan berpatokan pada ukuran-ukuran finansial tersebut. Pemerintah pusat sendiri menetapkan batasan-batasan dalam upaya meningkatkan PAD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 7, yakni daerah dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Namun di sisi lain, rendahnya PAD dan dana bagi hasil, serta besarnya DAU dan pinjaman daerah merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menilai seberapa tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Semakin tinggi ketergantungan daerah berarti daerah kurang memiliki keleluasaan untuk merumuskan dan mengalokasikan sumber daya dan dana sesuai dengan aspirasi daerah. Keterbatasan kewenangan dan keleluasaan pemerintah daerah dalam

mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya tersebut akan mencerminkan belum terlaksananya desentralisasi fiskal di daerah. Padahal pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang diharapkan akan sangat mempengaruhi target-target pembangunan nasional, antara lain penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing dan pertumbuhan sektor-sektor primer dan sekunder. Pemberian kewenangan kepada daerah juga memiliki potensi pengelolaan sumber daya yang lebih efisien sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian daerah harus mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan menggunakan kewenangan yang ada untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sesuai dengan tujuan pemberian otonomi kepada daerah. :

Tujuan pemberian otonomi daerah ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimana Kota Palembang menjadi salah satu titik berat penyelenggaraan otonomi daerah di Propinsi Sumatera Selatan. Penetapan ini didasari oleh kemampuan Kota Palembang dalam memenuhi variabel utama yakni kemampuan keuangan daerah khususnya PAD, kemampuan aparatur dalam produktivitas kerja dan efisiensi atau efektivitas tatalaksana, partisipasi masyarakat baik dalam pendanaan maupun dalam penyediaan sarana dan prasarana kemasyarakatan, kondisi dan fungsi daerah yang strategis ditinjau dari pertahanan, keamanan dan kesejahteraan rakyat, serta kemampuan organisasi dan administrasi. Selain itu Kota Palembang mampu memenuhi variabel

penunjang yakni keadaan geografis, demografi, karakteristik sosial budaya dan variabel khusus seperti kehidupan religi, politik, hukum. Keseluruhan variabel tersebut merupakan persyaratan utama dan Kota Palembang dipandang pemerintah pusat telah mampu memenuhi hal tersebut dengan kriteria penilaian yang cukup baik (Widjaja, 2001 : 198).

Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Palembang selama kurang lebih enam tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah telah membawa banyak perubahan khususnya dalam hal peningkatan anggaran keuangan daerah dari segi penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD). Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang menunjukkan kemandirian di Kota Palembang tidak cukup hanya dilakukan dengan melihat perbandingan data statistik keuangan daerah, tetapi juga harus dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator lain. Keberhasilan pelaksanaan otonomi di Kota Palembang dapat terlihat dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. Dengan kata lain, semakin meningkatnya PDRB di suatu daerah, maka akan berarti meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mempengaruhi Derajat Desentralisasi Fiskal atau tingkat kemandirian suatu daerah.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal Kota Palembang.

## **I. 2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah : Berapa besar pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal Kota Palembang ?

## **I. 3. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal Kota Palembang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat ini ditujukan bagi para akademisi dan masyarakat umum untuk mengembangkan penerapan ilmu ekonomi keuangan daerah, khususnya di dalam sektor penerimaan daerah.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat ini ditujukan bagi pemerintah yang diharapkan menjadi masukan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan penetapan kebijakan keuangan daerah terutama dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), khususnya bagi Pemerintah Kota Palembang.

## 1.5. Kerangka Teori

### 1.5.1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menurut beberapa ahli ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* atau GDP (Produk Domestik Regional Bruto) dan *Gross National Product* atau GNP (Produk Nasional Bruto) tanpa melihat dari sisi kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan terjadi perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat umumnya dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi (Enny, 2001 : 22).

Simon Kuznets dalam Enny (2001 : 38) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen tersebut membentuk karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terjadi dalam proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju. Karakteristik ini meliputi tingkat pertumbuhan output perkapita dan populasi yang tinggi, tingkat produktivitas faktor produksi secara keseluruhan yang tinggi terutama pada tenaga kerja (variabel agregatif), tingkat transformasi struktur ekonomi, tingkat transformasi sosial dan ideologi (variabel transformasi struktural). Selain itu meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional disebabkan oleh kecenderungan negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia demi mendapatkan pasar dan bahan baku dan pertumbuhan ekonomi yang hanya terbatas pada 1/3 populasi dunia.

### 1.5.2. Konsep Penerimaan Pemerintah

Pengelolaan daerah yang mengarah kepada peningkatan pembangunan daerah merupakan tugas pemerintah daerah yang perlu diperhatikan karena menyangkut dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai tugas dan kegiatan tersebut. Sumber penerimaan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah atau laba BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002 : 55).

Berdasarkan prinsip perpajakan, pajak didefinisikan sebagai suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dengan didasarkan pada undang-undang yang dapat dipaksakan kepada subyek pajak; dimana tidak ada balas jasa secara langsung terhadap penggunaannya (Mangkoesoebroto, 1997 : 181). Dengan demikian terdapat pihak-pihak yang dibebani oleh pajak baik produsen maupun konsumen. Analisis pihak-pihak yang menderita beban pajak menggunakan teori insidens pajak (*tax incidence theory*) yang dapat diidentifikasi melalui pihak yang menderita beban suatu pajak karena wajib pajak atau produsen mungkin dapat menggeserkan sebagian atau seluruh beban pajak kepada pihak lain/konsumen (*tax impact*). Namun hal ini tergantung pada empat faktor ekonomi, yaitu : elastisitas penawaran; permintaan; bentuk pasar; dan motivasi pengusaha. Musgrave dalam Mangkoesoebroto, 1997 : 185, membedakan analisis insidens pajak menjadi tiga, yaitu : insidens pajak anggaran berimbang; pajak diferensial; dan pajak absolut. Analisis tersebut dapat memperkirakan penggeseran beban pajak kepada pihak lain dalam bentuk kenaikan

harga terhadap konsumen atau penurunan penerimaan netto bagi pemilik faktor-faktor produksi.

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah harus memenuhi beberapa kriteria menurut A. Smith (Mangkoesoebroto, 1997 : 214), yaitu : distribusi beban pajak yang adil; beban lebih pajak (*excess burden*) yang minimal; struktur pajak mampu digunakan dalam kebijakan fiskal; sistem pajak dimengerti oleh wajib pajak, administrasi dan biaya pelaksanaan pajak harus efisien; dan pemungutan pajak harus tepat waktu tanpa membebani APBD. Pajak daerah sebagai salah satu dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan ganda yakni sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Dalam hal tertentu, suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah serta alat untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Disamping itu beberapa ahli keuangan daerah mengusulkan beberapa tolak ukur untuk menilai keberhasilan pajak daerah. Tolak ukur itu dikaitkan dengan hasil (*yield*), keadilan (*equity*), daya guna ekonomi (*economic efficiency*), kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), dan kecocokan sebagai sumber pendapatan daerah (*suitability as a local revenue source*).

Selain pajak daerah, penerimaan daerah dapat bersumber dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah dapat juga diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Suparmoko, 2002 : 85).

Ciri-ciri retribusi daerah (Kaho, 1997 : 152) :

1. Retribusi dipungut oleh daerah;
2. Prestasi yang diberikan daerah langsung dapat ditunjuk dalam pungutan retribusi.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan daerah.

Jadi, balas jasa yang diperoleh dari adanya retribusi daerah dapat langsung diunjuk dan dalam hal pemungutan iuran retribusi ini dianut azas manfaat (*benefit principles*). Asas ini menyatakan besarnya pungutan ditentukan berdasarkan besarnya manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diterima oleh pemerintah.

Untuk menilai manfaat yang harus ditempuh melalui beberapa langkah :

1. Mengidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya
2. Menerapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survei tentang kesediaan membayar (*willing to pay*) (Suparmoko, 2002 : 86).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan yang diserahkan atau yang ditunjuk oleh pemerintah pusat meliputi pajak dan retribusi daerah. Sumber penerimaan daerah lainnya adalah subsidi pemerintah pusat yang meliputi sumbangan dari pemerintah pusat dan bagian dari iuran pembangunan daerah yang kemudian diganti dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta

pungutan produksi terhadap usaha ekstraktif. Selanjutnya subsidi atau bantuan yang diberikan berupa subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan daerah tingkat I, kabupaten, desa, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah dasar, serta sarana kesehatan. Subsidi atau bantuan ini belum memiliki dasar yang pasti mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang disesuaikan dengan kekayaan (sumber daya alam) yang dieksploitasi dari masing-masing daerah.

### **1.5.3. Konsep Desentralisasi Fiskal**

Dalam setiap sistem perekonomian, baik kapitalis ataupun sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni. Sistem perekonomian campuran yang dianut di Indonesia telah menciptakan suatu pemerintahan yang memiliki hak dan wewenang yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah sebagai manifestasi dari penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia. Perbedaan hak dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah ini terletak pada pengambilan keputusan dan pengelolaan daerah sendiri dengan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai desentralisasi.

Desentralisasi menurut jenisnya dapat dibedakan dalam beberapa konsep, yaitu (Campo dan Sundaram, 2002; Sidik, 2002; Martinez-Vazquez dan McNab, 1997) :

- a. Desentralisasi geografis atau desentralisasi teritorial, yakni pembagian suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dengan kewenangan yurisdiksi yang jelas diantara daerah-daerah tersebut;
- b. Desentralisasi fungsional, yakni pendistribusian kewenangan dan tanggung jawab negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda dalam suatu pemerintahan;
- c. Desentralisasi politik dan administrasi. Desentralisasi politik berkenaan dengan kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembuatan keputusan mendapat peluang yang sangat luas, sedangkan desentralisasi administrasi erat kaitannya dengan desentralisasi politik, bahkan secara faktual keduanya sulit dibedakan. Namun lebih difokuskan pada operasionalisasi atau implementasi kebijakan atau keputusan publik agar berhasil secara optimal.
- d. Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab pembelanjaan dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bentuk-bentuk desentralisasi finansial ini antara lain adalah *self-financing* beberapa penyelenggaraan pembangunan di daerah, *cofinancing* atau *coproduction* dengan pihak-pihak swasta, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah dan retribusi, pinjaman daerah, serta transfer atau subsidi antar tingkatan pemerintahan.

Behrman, *et al* (2003) dan Sidik (2002), menyatakan bahwa dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara dunia terutama negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut misalnya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi, dan banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintah sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif. Menurut Bahl dan Mc Mullen (2000) serta Widjaja (2002), faktor-faktor tersebut memicu terbentuknya desentralisasi dimana satu hal yang penting adalah konsolidasi hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Jika keinginan rakyat sangat beragam dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang tidak memiliki dampak eksternal yang besar, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah pelayanan publik yang lebih baik, pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat.

Berkaitan dengan desentralisasi finansial atau disebut juga sebagai desentralisasi di bidang ekonomi, yakni adanya penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, bertujuan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional (Suyono, 2003). Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. Namun untuk menuju kepada sistem pemerintahan yang

lebih efektif dan efisien, sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat tersebut didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, dimana tetap ada sebagian wewenang dan tanggung jawab yang masih dikendalikan pemerintah pusat. Misalnya seperti kebijakan yang mengatur variabel ekonomi makro.

Komponen kunci dan utama dalam kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih besar. Pengertian desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing (Sidik, 2002; Bird dan Vaillancourt, 2000).

Khusus berkaitan dengan desentralisasi fiskal, banyak pakar menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan mobilisasi dana (Bird & Vaillancourt, 2000). Adapun kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, menurut Kadjatmiko (2002), dilakukan dengan tujuan yaitu : menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro; mengoreksi *vertical imbalance*, yaitu memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar *taxing power* daerah; mengoreksi *horizontal imbalance* yaitu ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangannya; meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah; meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Desentralisasi fiskal menimbulkan perbedaan yang menyangkut kemampuan keuangan daerah antara daerah yang satu dengan yang lain karena setiap daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri. Kewenangan atau otonomi yang luas tersebut didasarkan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perbedaan kemampuan keuangan daerah antara daerah yang satu dengan yang lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah;
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah;
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Dan
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi, adalah :

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

b. Ketergantungan kepada dana dari pusat harus seminimal mungkin, agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Nataluddin, 200 : 167)

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Listia Brata (2003 : 13-14) memperkenalkan pola “Hubungan Situasional” yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada empat macam pola hubungan yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**

**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (persen)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 persen – 25 persen	Instruktif
Rendah	25 persen – 50 persen	Konsultatif
Sedang	50 persen – 75 persen	Partisipatif
Tinggi	75 persen – 100 persen	Delegatif

Sumber : Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, 2001 : 69.

Empat macam pola hubungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pola Hubungan Instruktif : Peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

2. Pola Hubungan Konsultatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih sedikit mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif : Peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (Nataluddin, 2001 : 167-168).

Empat macam pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah diatas digunakan untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berikut ini terdapat beberapa alat analisis untuk menilai kondisi fiskal daerah dalam menentukan tingkat kemandirian daerah yang didasarkan pada konsep Musgrave dan Musgrave dalam buku "*Finance in Theory and Practice*, 1980 : 546-551 (Reksohadiprojo, 2000 : 24) yakni :

a. Upaya Fiskal (*Fiscal Effort*)

$$E_j = \frac{T_j B_j}{T_s B_j} = \frac{T_j}{T_s}$$

b. Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*)

$$N_j = N_s Z_j$$

$N_j$  = Kebutuhan Fiskal yuridiksi j

$N_s$  = Biaya penyediaan tingkat pelayanan

c. Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)

$$C_j = t_s B_j$$

$C_j$  = Kapasitas Fiskal juridiksi j

$T_s$  = Tarif Fiskal standar

$B_j$  = Basic fiskal di j

Namun karena data di daerah yang tidak mendukung, maka digunakan *proxy*.

Untuk melihat tingkat kemampuan daerah dapat digunakan perhitungan (Hikmah, 1999) sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Upaya Fiskal (*Tax Effort*) atau Posisi Fiskal.
3. Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*) dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik Perkapita.
4. Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*).

Salah satu formula yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan atau kemandirian daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal. Perhitungan ini lebih efektif untuk mengukur tingkat kemandirian daerah karena menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Total Penerimaan Daerah (TPD) merupakan keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Pusat Daerah atau Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Subsidi atau Bantuan Dana (B). Derajat Desentralisasi Fiskal itu sendiri tercermin dari besarnya total penerimaan suatu daerah (Darwin, John, 2002 : 67). Semakin besar Total Penerimaan Daerah

(TPD), maka semakin tinggi Derajat Desentralisasi Fiskal yang berarti semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah.

### **1.6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Hariyadi (2001 : 55-87), tentang estimasi penerimaan dan belanja daerah serta Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung, menyimpulkan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup besar. Hasil penelitian membuktikan proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah sebesar 11,61 persen, penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BPHBP) atau Pajak Pusat Daerah (PPD) terhadap TPD ialah sebesar 7,18 persen dan sumbangan daerah dari pemerintah pusat (DAU) terhadap TPD adalah sebesar 81,21 persen.

Penelitian Darwin (2002 : 67-70), tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat-daerah kasus Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa kecenderungan (trend) Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi desentralisasi fiskal daerah. Trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 1991/1992 sampai dengan 1999/2000 terus mengalami kenaikan. Konstanta mempunyai nilai koefisien sebesar 3,4665 yang berarti PAD akan tetap ada sebesar Rp. 3.4655 milyar.

Penelitian Brata (2003 : 42-51), tentang tingkat kemandirian daerah Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Derajat Desentralisasi Fiskal dan posisi fiskal daerah, mengemukakan bahwa lemahnya posisi fiskal berdampak pada rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal. Hal ini terlihat dari posisi fiskal sebesar 0.67 ( $e < 1$ ) yang inelastis dan Derajat Desentralisasi Fiskal antara 2,52 persen sampai

dengan 4,33 persen yang memberi arti bahwa kemampuan keuangan kabupaten Lampung Tengah sangat rendah dan masih tergantung kepada pemerintah pusat.

Penelitian Zahmanidar (2005 : 49-62), tentang analisis kinerja keuangan daerah dalam era otonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, menyimpulkan bahwa rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal dalam kurun waktu 10 tahun adalah sangat rendah yakni sebesar 3 persen sedangkan biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif dengan efektifitas sebesar 96,11 persen dan efisiensi sebesar 3,95 persen.

### **1.7. Hipotesis**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta tujuan dari penelitian, maka dapat dibuat suatu hipotesis bahwa : Tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang.

## **I.8. Metodologi Penelitian**

### **1.8.1. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul skripsi, maka tulisan ini terbatas pada ruang lingkup daerah Palembang dan menitikberatkan pembahasan pada aspek-aspek keuangan daerah yang meliputi analisis pertumbuhan ekonomi dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Kota Palembang dipilih sebagai objek dari penelitian ini dikarenakan secara struktural daerah ini mengalami kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagai daerah otonom setelah diberlakukannya sistem otonomi daerah. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan untuk mengetahui kemandirian dan kemampuan

daerah dalam memperoleh sumber keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah.

### **1.8.2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Palembang, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan dan Kota Palembang, BAPPEDA Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.8.3. Teknik Analisis**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif induktif. Analisis kualitatif deskriptif menggunakan statistik deskriptif dan analisis secara kualitatif untuk menjelaskan angka-angka baik dari hasil perhitungan maupun tabel yang ada (Bahl, 1972; Smith, 1973; Musgrave hal. 984; Uppal dan Suparmo, 1986). Analisis kuantitatif induktif menggunakan regresi model ekonometrika untuk melakukan perhitungan atas data yang tersedia (Willianson, 1961; Weiss, 1969; dan Bahl, 1971). Dalam analisis ini digunakan model-model sebagai berikut :

#### **1.8.3.1. Model Ekonometrika**

Untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebagai indikator Derajat Desentralisasi Fiskal.

Untuk menghitung tingkat atau laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pada suatu tahun tertentu digunakan rumus berikut ini :

$$Gt = \frac{Yrt1 - Yrt}{Yrt} \times 100\%$$

keterangan :

Gt = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

Yrt1 = PDRB riil (konstan) pada tahun  $t_1$

Yrt = PDRB riil (konstan) pada tahun  $t$  atau tahun sebelumnya

(Enny, 2001 : 26)

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka digunakan suatu fungsi regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$\frac{PAD}{TPD} = f(r\Delta PDRB)$$

yang kemudian diturunkan menjadi :

$$\text{Ln DD} = \alpha + \beta \text{LnPDRB} + e$$

keterangan :

Ln = Logaritma Natural

DD = Derajat Desentralisasi Fiskal (Rasio PAD terhadap TPD)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan/Gt)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Parameter

$e$  = Standard Error

Pengujian model ini menggunakan :

1. Uji T (t-test)

Uji ini digunakan untuk memperlihatkan keandalan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, sehingga dapat diketahui validitas persamaan regresi dalam memprediksi kondisi riil, rumusnya adalah :

$$t_n = \frac{b_i}{s_{b_i}}$$

dimana :

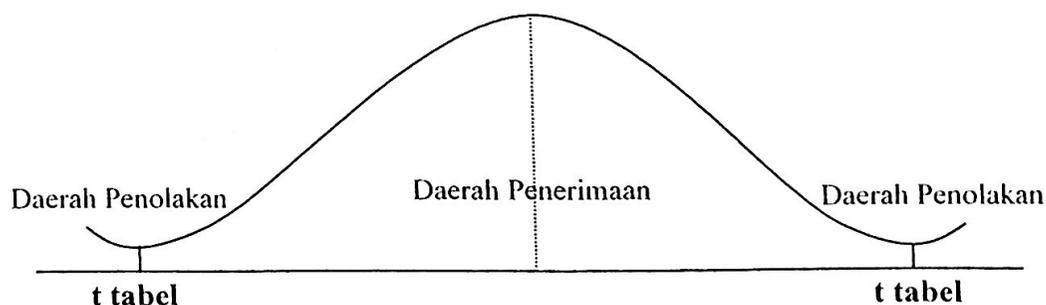
$t_n$  = nilai t hitung

$b_i$  = parameter

$s_{b_i}$  = standar kesalahan parameter  $b_i$ , rumusnya adalah :

$$s_{b_i} = \sqrt{\frac{se^2}{\sum x_{i2}}}$$

t-hitung ( $t_n$ ) ini kemudian dibandingkan dengan t-tabel. Apabila t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel, maka  $h_0$  diterima. Apabila t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka  $h_0$  ditolak dan  $h_a$  diterima, dengan derajat kepercayaan 95% daerah penerimaan hipotesis.

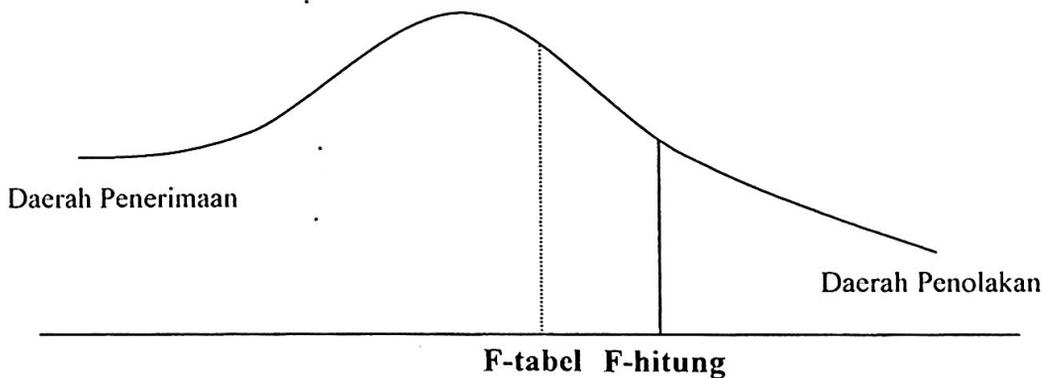


## 2. Uji F (f-test)

Uji ini menggunakan rumus :

$$F_n = \frac{\text{Rata-rata Kuadrat Regresi}}{\text{Rata-rata Kuadrat Kesalahan Pengganggu}}$$

F hitung ( $F_n$ ) ini kemudian dibandingkan dengan F tabel dan derajat kepercayaan yang digunakan sebesar 95%. Apabila nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka  $H_0$  diterima. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka  $H_a$  diterima. Jika  $H_0$  diterima berarti  $H_a$  ditolak, sebaliknya jika  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima.



### 1.8.3.2. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang dapat diukur dengan membandingkan nilai PAD dengan Total Penerimaan Daerah (TPD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap TPD dan Bantuan Pemerintah Pusat (B) terhadap TPD atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DD = \frac{PAD}{TPD}$$

$$DDP = \frac{BHPBP}{TPD}$$

$$DDB = \frac{B}{TPD}$$

dimana :

$$TPD = PAD + BHPBP + B$$

Keterangan :

DD = Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang

DDP = Derajat Desentralisasi Hasil Perpajakan Kota Palembang

DB = Derajat Bantuan atau Subsidi Kota Palembang

PAD = Jumlah PAD Kota Palembang

TPD = Total Penerimaan Daerah Kota Palembang

BHPBP = Jumlah Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Palembang (BHPBP)

B = Jumlah Penerimaan dari bantuan subsidi dan sumbangan Kota Palembang

(Ahmad, 1990 : 29-39)

Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebagai berikut:

0 persen – 25 persen = Rendah Sekali

25 persen – 50 persen = Rendah

50 persen – 75 persen = Sedang

75 persen – 100 persen = Tinggi

(Yuliati, dkk., 2001 : 27)

## 1.9. Batasan Variabel Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis skripsi, maka penulis memiliki batasan-batasan variabel agar pembahasan tidak melebihi dari penulisan ini. Batasan-batasan variabel tersebut adalah sebagai :

1. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
2. Pajak daerah, ialah iuran wajib orang perorangan kepada badan pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat dipaksakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001).
3. Retribusi daerah, ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001).
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit-unit produksi dalam periode tertentu selama satu tahun (BPS, 2004)
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

6. Daerah Otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
8. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing (Sidik, 2002; Bird dan Vaillancourt, 2000)
9. Derajat Desentralisasi Fiskal adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (Darwin, John, 2002).
10. Upaya fiskal adalah rasio persentase perubahan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Regional Domestik Bruto (Uppal, 1985 : 79).
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Arie, *Peranan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perekonomian Daerah Sumatera Selatan*, Skripsi FE Unsri, Palembang, 2001.
- Aswin, HM, *Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pendekatan Balanced Scorecard*, disertasiweb, [www.dprdkutaikartanegara.org.id](http://www.dprdkutaikartanegara.org.id), 2005.
- Bappeda Sumsel, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2008*, RPJMSS, [www.bappedasumsel.go.id](http://www.bappedasumsel.go.id), 2006
- Bappeda Sumsel, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006*, RKPDS, [www.bappedasumsel.go.id](http://www.bappedasumsel.go.id), 2005
- BPS, Palembang Dalam Angka 1993-2004.
- BPS, PDRB Kota Palembang 1993-2004.
- CDS Indonesia, *Visi-Strategi Kota Palembang*, [www.cdsindonesia.org.id](http://www.cdsindonesia.org.id), 2003
- Dadan, *Desentralisasi Fiskal dan Pertarungan Kewenangan Pusat-Daerah*, Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi, [www.jpip.co.id](http://www.jpip.co.id), 2005.
- Darwin, John, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Daerah Kasus Provinsi Sumatera Selatan*, Thesis Pasca Sarjana Unsri, Palembang, 2002.
- E-Government Kota Palembang, *Penduduk, Keuangan dan Geografis Kota Palembang*, [www.palembang.go.id](http://www.palembang.go.id), 2005.
- E-Government Kota Palembang, *Rencana Strategis Kota Palembang Tahun 2004-2008*, [www.palembang.go.id](http://www.palembang.go.id), 2006.
- Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- Hanafiah, Enny M., *Kumpulan Kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan*, FE Unsri, Palembang, 2001.

- Hariyadi, Jasagung, *Estimasi Penerimaan dan Belanja Daerah Serta Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung*, Palembang, 2001.
- Hermanto, *Analisis Penerimaan Retribusi IMB Kota Palembang*, Skripsi FE Unsri, Palembang, 2004.
- Ismail, Zainuddin, *Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Selatan*, Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, 2003.
- Kurniadi, Teddy, *Analisis Upaya Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*, Skripsi FE Unsri, Palembang, 2006.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Mangkoesoebroto, Guritno, *Ekonomi Publik, Edisi 3*, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Republika Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2001.
- Saddat, M. Anwar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Palembang*, Skripsi FE Unsri, Palembang, 2004.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Santoso, Singgih, *SPSS Versi 10*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Sugita, Norman, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Kabupaten Musi Rawas*, Skripsi FE Unsri, Palembang, 2005.
- Supranto, J., *Ekonometrika I*, LPFE-UI, Jakarta, 1984.
- Suparmoko, *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.

Susetyo, Didik, *Stimulus Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pemilu*, Makalah disampaikan dalam *Forum Diskusi Kebijakan Ekonomi, Fiskal, Moneter, dan Perbankan* diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Bank Indonesia, Rabu 21 Juli 2004 di Palembang.

Widjaja, HAW., *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Widodo, Hg Suseno Triyanto, *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Zahmanidar, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Skripsi FE Unsri, Palembang, 2005.